

Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan

Laga Priseptian^{1*}, Wiwin Priana Primandhana²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya.

*Email: 18011010063@student.upnjatim.ac.id

Abstrak

Salah satu ukuran kondisi sosial dan ekonomi dalam menilai keberhasilan pembangunan pemerintah di suatu daerah adalah tingkat kemiskinan itu sendiri. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Provinsi (X_1), Indeks Pembangunan Manusia (X_2), Pertumbuhan Ekonomi (X_3) dan Pengangguran (X_4) terhadap Kemiskinan (Y) di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2005 hingga 2020. Metode penelitian kuantitatif yang menggunakan analisis regresi linier berganda dengan model Ordinary Least Square (OLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upah Minimum Provinsi (X_1) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (X_2) memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi (X_3) memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, Pengangguran (X_4) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, dan secara simultan seluruh variabel bebas mempengaruhi kemiskinan di Jawa Timur.

Kata Kunci: Kemiskinan; upah minimum provinsi; indeks pembangunan manusia; pertumbuhan ekonomi; pengangguran

Analysis of factors affecting poverty

Abstract

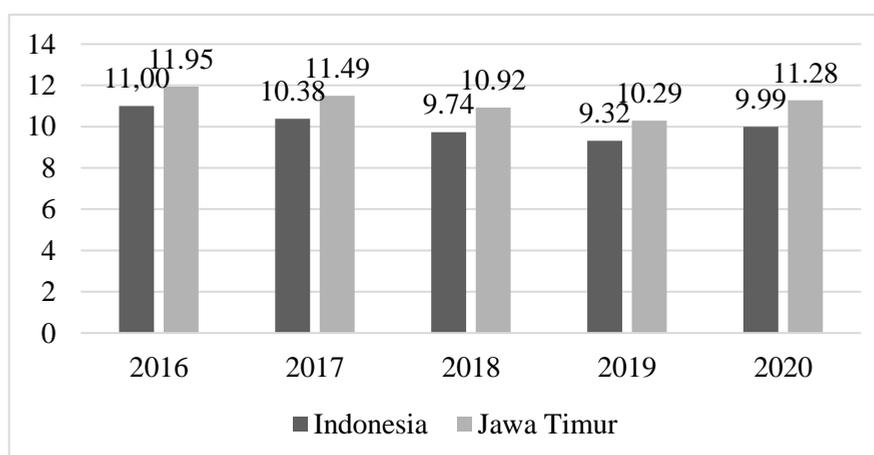
One measure of social and economic conditions in assessing the success of government development in an area is the level of poverty itself. This study was conducted to find out the effect of the Provincial Minimum Wage (X_1), Human Development Index (X_2), Economic Growth (X_3) and Unemployment (X_4) on Poverty (Y) in East Java Province from 2005 to 2020. Quantitative research methods that use linear regression analysis double with the Ordinary Least Square (OLS) model. The results showed that the Provincial Minimum Wage (X_1) had a negative and significant influence on poverty, the Human Development Index (X_2) had a positive and insignificant influence on poverty, Economic Growth (X_3) had a negative and insignificant influence on poverty, Unemployment (X_4) had a positive and significant influence on poverty, and simultaneously all free variables affected poverty in East Java.

Keywords: *Poverty; provincial minimum wage; human development index; economic growth; unemployment*

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah utama bagi banyak negara di dunia, terutama di negara berkembang. Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, obat-obatan dan tempat tinggal (Hardinandar, 2019). Salah satu ukuran kondisi sosial dan ekonomi dalam menilai keberhasilan pembangunan pemerintah di suatu daerah adalah adanya kemiskinan itu sendiri (Oktaviana et al., 2021).

Grafik kemiskinan di Indonesia berbanding lurus dengan Jawa Timur. Namun kemiskinan di Jawa Timur masih melebihi angka kemiskinan di Indonesia, hal tersebut tentu menjadi sebuah permasalahan mengingat Jawa Timur memberikan kontribusi terbesar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut data BPS Indonesia (2021) rata-rata angka kemiskinan di Jawa Timur dinyatakan berada di urutan ke-15 dari 34 provinsi di Indonesia.



Gambar 1. Persentase kemiskinan Indonesia dan Jawa Timur tahun 2016-2020

Provinsi Jawa Timur memiliki tingkat kemiskinan tertinggi ketiga dibandingkan dengan Pulau Jawa seperti DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten (BPS Indonesia, 2021). Hal ini menunjukkan ketimpangan pertumbuhan ekonomi di semua kelas sosial dimana pertumbuhan ekonomi hanya dirasakan oleh sekelompok kecil masyarakat.

Tabel 1. Kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2016-2020

Nama Wilayah	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
DI Yogyakarta	13,22	12,69	11,97	11,57	12,54
Jawa Tengah	13,23	12,62	11,25	10,69	11,62
Jawa Timur	11,95	11,49	10,92	10,29	11,28
Jawa Barat	8,86	8,27	7,35	6,86	8,15
Banten	5,39	5,52	5,24	5,01	6,27
DKI Jakarta	3,75	3,77	3,56	3,45	4,61

Peningkatan kemiskinan di Jawa Timur disebabkan oleh jumlah penduduk yang besar, namun tidak diimbangi dengan pemerataan penduduk dan peningkatan kesempatan kerja (BPS Jawa Timur, 2021). Selama ini mayoritas penduduk masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Menurut data sensus BPS 2020, 56,10% dari total penduduk Indonesia tinggal di Jawa, dimana 26,11% tinggal di Jawa Timur. Kenaikan harga bahan pokok akibat kelangkaan sembako pada pandemi Covid-19 juga menjadi salah satu penyebab naiknya angka kemiskinan di Jawa Timur. Akibatnya terjadi ketimpangan distribusi kesenjangan pembangunan dan pendapatan, serta pertumbuhan ekonomi yang tidak merata.

Selain itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Jawa Timur, seperti upah minimum, kualitas hidup masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran. UMP adalah upah minimum termasuk tunjangan pokok dan tunjangan tetap, atau upah minimum yang ditetapkan gubernur yang harus dibayarkan pada pekerja yang menduduki jabatan terendah dalam struktu jabatan (Djumaldji,

2006). Kualitas hidup masyarakat digambarkan oleh IPM menggambarkan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dari segi pendapatan, kesehatan, pendidikan dan lainnya. Selain itu, pertumbuhan ekonomi berimplikasi pada berkembangnya kegiatan ekonomi yang meningkatkan barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat secara proporsional dengan kemakmuran masyarakat (Sukirno, 2011). Serta pengangguran merupakan ukuran seberapa besar dari total angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan.

Larasati Prayoga et al. (2021) menyatakan bahwa kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain upah minimum yang tidak memadai, taraf hidup masyarakat yang buruk, dan meningkatnya angka pengangguran setiap tahun tanpa adanya tambahan kesempatan kerja. Todaro & Stephen C (2014) menjelaskan upah minimum dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan dengan demikian dapat mengurangi kemiskinan. Standar hidup masyarakat digambarkan melalui meningkatnya kualitas pengetahuan, keterampilan dan bakat. Pangiuk (2018) menjelaskan dengan pertumbuhan ekonomi akan terwujud kesejahteraan masyarakat melalui berbagai pembangunan sosial dan pembangunan ekonomi dalam mengatasi masalah kemiskinan. Terbatasnya jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia menjadi penyebab utama terjadinya pengangguran dan berdampak langsung pada tingginya kemiskinan (O'Campo et al., 2015).

Dari uraian diatas terlihat bahwa fenomena penurunan kemiskinan di Jawa Timur masih cukup tinggi dibandingkan dengan 34 provinsi di Indonesia dan beberapa provinsi di Jawa. Sebaliknya pandemi Covid-19 telah menaikkan angka kemiskinan dan menjadi fokus upaya pemerintah mengatasi kemiskinan yang tidak tepat sasaran. Selain itu, kemiskinan tidak diimbangi dengan pemerataan penduduk dan peningkatan kesempatan kerja. Dampak kemiskinan terhadap perekonomian sangat merugikan dan untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang kemiskinan di Jawa Timur.

METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan studi kuantitatif dan menggunakan rumus-rumus statistik untuk membantu dalam analisis data dan fakta yang diperoleh. Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berkaitan dengan filosofi positifisme yang digunakan untuk survei populasi atau sampel tertentu, metode pengumpulan data menggunakan alat survey, dan data statistik (Sugiyono & Susanto, 2015). Tempat penelitian dilakukan melalui pengumpulan data di Provinsi Jawa Timur kurun waktu 16 tahun, yaitu dari 2005 hingga 2020. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah, yaitu variabel kemiskinan (Y) dalam satuan persentase, variabel UMP (X_1) dalam satuan rupiah, variabel IPM (X_2) dalam satuan persentase, variabel pertumbuhan ekonomi (X_3) dalam satuan persentase, dan variabel pengangguran (X_4) dalam satuan persentase.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh upah minimum provinsi, indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran terhadap kemiskinan di Jawa Timur. Metode yang digunakan dalam analisis adalah analisis regresi linier berganda dengan model OLS (*Ordinary Least Squares*) dan menggunakan uji asumsi klasik BLUE (*Best Linier Unbiased Estimate*) yang diaplikasikan pada program SPSS versi 25.

Bentuk persamaan regresi berganda oleh Supranto (2004) yang kemudian disesuaikan oleh penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

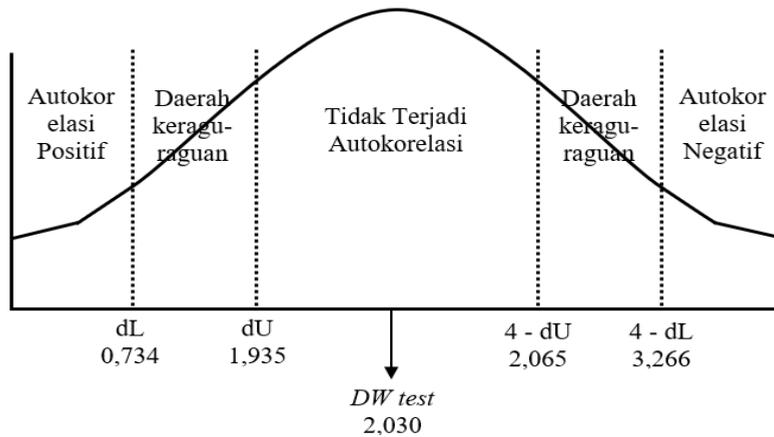
$$Kmskn = \beta_0 + \beta_1 UMP + \beta_2 IPM + \beta_3 PE + \beta_4 PNG + \mu_i$$

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji asumsi klasik (BLUE), uji koefisien determinasi (R^2), uji simultan (uji F), dan uji parsial (uji t).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk memeriksa hubungan antara pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (Gujarati, 2010). Uji Durbin-Watson digunakan untuk menentukan ada tidaknya autokorelasi. Uji ini dikatakan tidak memiliki autokorelasi jika $dU \leq dw \leq 4-dU$.



Gambar 2. Kurva *durbin-watson* test

Dari gambar 2 diperoleh nilai *Durbin-Watson* adalah 2,030. Nilai dU adalah 1,935 karena N yang merupakan jumlah sampel diperoleh 16 dan k adalah jumlah variabel bebas yaitu 4. Hasilnya adalah $1,935 (dU) \leq 2,030 (DW) \leq 2,065 (4-dU)$. Sehingga penelitian ini berada dalam area tidak ada autokorelasi.

Uji multikolinearitas

Multikolinearitas terjadi karena sebagian besar variabel dalam model regresi saling berhubungan (Gujarati, 2010). Dalam penelitian ini mengidentifikasi gejala multikolinearitas menggunakan nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Multikolinearitas tidak akan terjadi apabila nilai tolerance $\geq 0,10$ dan nilai VIF $\leq 10,00$.

Tabel 2. Hasil uji multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1		
X1 = UMP	,216	4,630
X2 = IPM	,584	1,711
X3 = PE	,504	1,984
X4 = PNG	,343	2,918

Dari tabel 2 seluruh variabel bebas memiliki nilai tolerance $\geq 0,10$ dan nilai VIF $\leq 10,00$. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas dalam penelitian ini menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas.

Uji heteroskedastisitas

Untuk menguji heteroskedastisitas, penelitian ini menggunakan uji Rank Spearman. Uji koefisien korelasi Rank Spearman bertujuan untuk mengkorelasikan residual absolut hasil regresi dengan semua variabel bebas (Sujarweni, 2014). Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Hasil uji heteroskedastisitas

Variabel Y	Sig 2-tailed (X ₁)	Sig 2-tailed (X ₂)	Sig 2-tailed (X ₃)	Sig 2-tailed (X ₄)	Ketentuan	Keterangan
Kemiskinan	0,610	0,940	0,528	0,970	$\geq 0,05$	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Dari tabel 3 dapat dilihat bahwa variabel bebas tidak menunjukkan tanda gejala heteroskedastisitas, karena karena nilai hasil signifikansi $\geq 0,05$. Dijelaskan bahwa nilai residual tidak berkolerasi secara signifikan dengan variabel.

Uji koefisiensi determinasi (R^2)

Nilai R square pada uji koefisien determinasi menunjukkan seberapa dekat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Ghazali (2018) menjelaskan bahwa kolom R square menunjukkan jumlah persentase yang dijelaskan oleh variabel independen, dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model regresi.

Tabel 4. Uji koefisien determinasi

Model summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,990 ^a	,980	,972	,58729	2,030

a. Predictors: (Constant), X4 = PNG, X2 = IPM, X3 = PE, X1 = UMP

b. Dependent Variable: Y = KMSKN

Dari tabel 4 menunjukkan nilai R Square sebesar 0,980 atau 98%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas mempunyai hubungan sangat kuat dengan Kemiskinan sebesar 98%, selebihnya 2% dijelaskan oleh variabel selain variabel bebas yang digunakan dalam penelitian.

Uji F (simultan)

Uji statistik simultan atau uji F menunjukkan apakah semua variabel bebas memiliki pengaruh yang sama terhadap variabel terikat. Sujarweni (2014) menjelaskan bahwa jika F hitung \geq F tabel atau signifikansi $F \leq 0,05$ ($\alpha=5\%$), maka dapat ditentukan bahwa variabel bebas mempengaruhi variabel terikat secara bersamaan.

Tabel 5. Uji F (ANOVA)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	184,035	4	46,009	133,395	,000 ^b
	Residual	3,794	11	,345		
	Total	187,829	15			

a. Dependent Variable: Y = KMSKN

b. Predictors: (Constant), X4 = PNG, X2 = IPM, X3 = PE, X1 = UMP

Dari tabel 5 diperoleh nilai F hitung adalah 133,395 dengan signifikansi 0,000^b dengan taraf signifikansi 5% atau $\alpha = 0,05$ maka nilai Sig. $0,000 < 0,005$. Sedangkan nilai F tabel dengan *degree of freedom* (df1) adalah jumlah variabel bebas sebesar 4, dan df2 sebesar 11 ($n-k-1$) diperoleh nilai F tabel sebesar 3,366 maka $133,395 (F \text{ hitung}) \geq 3,366 (F \text{ tabel})$. Dapat disimpulkan seluruh variabel bebas mempunyai pengaruh signifikan secara simultan terhadap kemiskinan.

Uji t (Parsial)

Uji t menunjukkan apakah variabel bebas secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

Tabel 6. Uji t (Parsial)

Variabel	t Hitung	t Tabel	Sig.
Upah Minimum Provinsi (X_1)	-6,584	2,201	0,000
Indeks Pembangunan Manusia (X_2)	2,087	2,201	0,061
Pertumbuhan Ekonomi (X_3)	-0,293	2,201	0,775
Pengangguran (X_4)	6,993	2,201	0,000

Dari tabel 6 dapat dilihat bahwa variabel UMP (X_1) berpengaruh negatif dan signifikan, variabel IPM (X_2) berpengaruh positif dan tidak signifikan, variabel pertumbuhan ekonomi (X_3) berpengaruh negatif dan tidak signifikan, dan variabel pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

Pengaruh upah minimum provinsi terhadap kemiskinan

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa UMP memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi jumlah UMP maka kemiskinan di Jawa Timur semakin rendah atau mengalami penurunan. Sebaliknya, jika jumlah UMP rendah maka kemiskinan tinggi. Menurut teori Boediono (2014) menaikkan upah minimum sebagai mekanisme untuk meningkatkan pendapatan penduduk dalam kesejahteraan pekerja dan pada akhirnya upah minimum dapat mengurangi kemiskinan. Senada dengan pernyataan dari Disnakertrans Jawa Timur (2021) upah minimum provinsi membantu mencegah upah pekerja jatuh ke level terendah sebagai akibat dari ketidakseimbangan pasar tenaga kerja di Jawa Timur, dengan memperhatikan aspek produktivitas dan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai keberlangsungan usaha dan meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Utami & Masjkuri (2018) tentang pengaruh UMP terhadap kemiskinan yang berpengaruh negatif dan signifikan. Studi lain oleh Sholihin & Wiwoho (2020) juga menemukan bahwa hal itu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Dengan demikian, peningkatan UMP di Jawa Timur memberikan peluang bagi pekerja untuk meningkatkan dan memenuhi kebutuhan hidupnya, atau setidaknya memenuhi standar hidup minimum mereka, yang juga berdampak pada kesejahteraan pekerja, sehingga akan menyelamatkan pekerja dari kemiskinan.

Pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa IPM memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan di Jawa Timur meningkat seiring dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia di Jawa Timur. Tetapi peningkatan IPM tidak besar dan tidak signifikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa IPM bukan merupakan salah satu faktor penentu kemiskinan di Jawa Timur. Hal ini karena kenaikan IPM di Jawa Timur dibentuk oleh tiga aspek: a) Rata-rata indeks harapan hidup di Jawa Timur belum menjangkau penduduk miskin secara keseluruhan, sehingga masih terdapat angka kematian bayi yang tinggi; b) Pengetahuan diartikan sebagai pendidikan yang diterima oleh sebagian kecil masyarakat berpenghasilan tinggi dan masyarakat miskin di Jawa Timur secara keseluruhan belum banyak merasakannya; dan c) Standar hidup rendah karena daya beli masyarakat Jawa Timur rendah. Pernyataan tersebut didukung oleh BPS Jawa Timur (2021) yang menyatakan bahwa sekitar setengah dari penduduk miskin di Jawa Timur berada dalam kondisi kesehatan yang sangat buruk, hal ini tergambar dari penggunaan tempat pembuangan air limbah dengan septic tank di dekat sumur yang masih terus digunakan sehingga menyebabkan pencemaran air bersih.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Syaifullah & Malik (2017) bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara IPM dengan kemiskinan. Studi lain oleh M Palenewen et al. (2018) juga menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Walaupun kenaikan IPM didorong oleh berbagai program pemerintah di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi di Jawa Timur, serta peningkatan kualitas infrastruktur daripada sumber daya manusia. Keberhasilan program tersebut juga tergantung pada cara pandang masyarakat terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana (BPS Jawa Timur, 2021).

Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan di Jawa Timur menurun seiring dengan meningkatnya pertumbuhan di Jawa Timur. Tetapi peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak besar dan tidak signifikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi bukanlah salah satu faktor penentu kemiskinan di Jawa Timur. Hasil ini tidak sesuai dengan teori Sukirno (2011) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi menyebabkan peningkatan barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dan membuatnya sejahtera. Hasil pertumbuhan ekonomi tidak terfokus pada masalah kemiskinan, tetapi digunakan untuk keperluan lain seperti transportasi, infrastruktur dan perumahan sehingga tidak ada dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskiniannya di Jawa Timur. Pernyataan ini didukung oleh (BPS Jawa Timur, 2021) yang menyeimbangkan pembangunan perkotaan dan perdesaan, dengan kawasan perkotaan menjadi pusat pengumpulan dan distribusi produksi di

perdesaan, dan kawasan perdesaan diarahkan menjadi pusat produksi agribisnis/agropolitan dan sektor lainnya.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Fadila & Marwan (2020) bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan. Studi lain oleh Nainggolan (2020) juga menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Dapat ditunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis mengurangi kemiskinan dan seringkali terjadi ketidak-konsistenan pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan di Jawa Timur.

Pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pengangguran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi jumlah pengangguran maka kemiskinan di Jawa Timur semakin tinggi atau mengalami peningkatan. Sebaliknya, jika jumlah pengangguran rendah maka kemiskinan rendah. Senada dengan teori Sukirno (2011) bahwa efek negatif dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat dan pada akhirnya terjadi penurunan kesejahteraan masyarakat yang memungkinkan jatuh ke dalam perangkap kemiskinan. Banyaknya pengangguran di Jawa Timur disebabkan oleh pertumbuhan angkatan kerja dengan kesempatan kerja yang tidak merata, kesempatan kerja yang terbatas dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan pandemi Covid-19, angkatan kerja yang buruk, kesenjangan pasokan tenaga kerja dengan kebutuhan tenaga kerja yang tidak memadai, dan motivasi kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja baru masih rendah (Disnakertrans Jawa Timur, 2021).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Bintang & Woyanti (2018) tentang pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan yang berpengaruh positif dan signifikan. Studi lain oleh Ariasih & Yuliarmi (2021) juga menemukan bahwa hal itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Dengan demikian pengangguran tentunya tidak memiliki penghasilan dari pekerjaan yang pada akhirnya akan mengurangi kekayaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketika kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi, mereka dimasukkan dalam kategori orang miskin.

SIMPULAN

Diperoleh kesimpulan secara simultan UMP, IPM, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran mempengaruhi kemiskinan di Jawa Timur. Secara parsial UMP (X1) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, hal ini dikarenakan UMP membantu mencegah upah pekerja jatuh ke level terendah sebagai akibat dari ketidakseimbangan pasar tenaga kerja di Jawa Timur. Secara parsial IPM (X2) memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, hal tersebut akibat indeks harapan hidup di Jawa Timur belum menjangkau penduduk miskin seluruhnya, pendidikan diterima oleh sebagian kecil masyarakat berpenghasilan tinggi dan standar hidup rendah. Secara parsial Pertumbuhan Ekonomi (X3) memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan, ini terjadi karena hasil pertumbuhan ekonomi tidak terfokus pada masalah kemiskinan, tetapi digunakan untuk keperluan lain seperti transportasi, infrastruktur dan perumahan sehingga tidak ada dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Jawa Timur. Secara parsial Pengangguran (X4) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, ini terjadi karena banyaknya pengangguran di Jawa Timur disebabkan oleh pertumbuhan angkatan kerja dengan kesempatan kerja yang tidak merata, angkatan kerja yang buruk dan lain sebagainya sehingga pada akhirnya akan mengurangi pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Diharapkan pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan perhatian khusus kepada masyarakat yang kurang mampu dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan dan program lainnya, menjaga upah minimum untuk memenuhi kebutuhan taraf hidup masyarakat, menjaga perkembangan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan, dan melakukan banyak pelatihan tenaga kerja untuk mengembangkan keterampilan.

DAFTAR PUSTAKA

Ariasih, N. L. M., & Yuliarmi, N. N. (2021). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Kesehatan, dan Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali. *Jurnal Ilmiah Indonesia Cerdika*, 1(7), 807–825.

-
- Bintang, A. B. M., & Woyanti, N. (2018). Pengaruh PDRB, Pendidikan, Kesehatan, Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Tengah (2011-2015). *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 33(1), 20–28. <http://dx.doi.org/10.24856/mem.v33i1.563>
- Boediono. (2014). *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 5 Ekonomi Makro*. Yogyakarta:BPFE.
- BPS Indonesia. (2021). *Berita Resmi Statistik*. <https://www.bps.go.id/>
- BPS Jawa Timur. (2021). *Berita Resmi Statistik*. <https://jatim.bps.go.id/>
- Disnakertrans Jawa Timur. (2021). *Buku Informasi dan Profil Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Provinsi Jawa Timur*. <https://disnakertrans.jatimprov.go.id/>
- Djumialdji, F. . (2006). *Perjanjian Kerja*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Fadila, R., & Marwan, M. (2020). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat periode tahun 2013-2018. *Jurnal Ecogen*, 3(1), 120. <https://doi.org/10.24036/jmpe.v3i1.8531>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisa Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang:Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. (2010). *Basic Econometrica. Fifth Edition*. New Yorik:Mc Graw Hill.
- Hardinandar, F. (2019). Determinan Kemiskinan (Studi Kasus 29 Kota/Kabupaten Di Provinsi Papua). *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(1), 1–12. <https://doi.org/10.31002/rep.v4i1.1337>
- Larasati Prayoga, M., Muchtolifah, & Sishadiyati. (2021). Faktor Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo. *Jambura Economic Education Journal*, 3(2), 135–143. <https://doi.org/10.24856/mem.v33i2.671>
- M Palenewen, T. O., Walewangko, E. N., & Sumual, J. I. (2018). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Sektor Kesehatan Terhadap IPM Dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(4), 52–61.
- Nainggolan, E. (2020). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara (2010-2019). *Manajemen Bisnis Eka Prasetya*, 6(2), 61–74. <https://doi.org/10.47663/jmbep.v6i2.58>
- O'Campo, P., Molnar, A., Renany, A., Mitchell, C., Shankardass, K., & Muntaner, C. (2015). Social welfare matters: A realist review of when, how, and why unemployment insurance impacts poverty and health. *Social Science & Medicine*, 132, 88–94.
- Oktaviana, D., Primandhana, W. P., & Wahed, M. (2021). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Kabupaten, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Kabupaten Madiun. *Jurnal Syntax Idea*, 4(1), 6.
- Pangiuk, A. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penurunan Kemiskinan di Provinsi Jambi Tahun 2009-2013. *ILTIZAM Journal of Sharia Economic Research*, 2(2), 44. <https://doi.org/10.30631/iltizam.v2i2.160>
- Sholihin, M. K., & Wiwoho, B. (2020). Pengaruh Upah Minimum dan Tingkat Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 5(September), 12–26. <https://doi.org/10.1234/jeb17.v5i2.5677>
- Sugiyono, & Susanto, A. (2015). *Cara Mudah Belajar SPSS & Lisrel*. Bandung:CV. Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2014). *Metode Penelitian: Langkah, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta:Pustaka Baru Press.
- Sukirno, S. (2011). *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Supranto, J. (2004). *Analisis Multivariat: Arti dan Interpretasi*. Jakarta:PT Rineka Cipta.
-

- Syaifullah, A., & Malik, N. (2017). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Produk Domestik Bruto Terhadap Tingkat Kemiskinan di ASEAN-4 (Studi Pada 4 Negara ASEAN). *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(1), 107–119. <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jie/article/download/6071/5525>
- Todaro, M. P., & Stephen C, S. (2014). *Economic Development*. United Kingdom:Pearson Education Limited.
- Utami, H. W., & Masjkuri, S. U. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Pendidikan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Airlangga*, 4(01), 11–20. 10.20473/jeba.V28I22018.5822